



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
PUSAT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS**

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110 Tlp. (021) 27513546

**MINUTES OF MEETING
KICK OFF MEETING
INTEGRATED TOURISM MASTER PLAN LOMBOK**

Tanggal : 24 Juli 2018
Tempat : Hotel Santika, Mataram
Peserta :

- **Pemerintah Daerah:**
 - Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Dinas Perumahan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara barat
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Bappeda Kota Mataram
 - Bappeda Kabupaten Lombok Utara
 - Bappeda Kabupaten Lombok Barat
 - Bappeda Kabupaten Lombok Timur
 - Bappeda Kabupaten Lombok Tengah
- **The World Bank Team**
- **Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)**
- **Tim Konsultan Penyusun ITMP Lombok (AECOM)**
- **Pemerintah:**
 - Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
 - Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
 - Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata
 - Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR
 - Direktorat Bina Penataan Bangunan, Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Pengembangan Kawasan Permukiman, Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen CK, Kementerian PUPR
 - Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR.
 - Pusat Perencanaan Infrastruktur, BPIW, Kementerian PUPR.
 - Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Mataram, Direktorat Jendral Bina Marga
 - Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Ditjen SDA, Kementerian PUPR

A. PEMBUKAAN DAN ARAHAN

Ir. Kuswardono, MCP

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW

1. *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata yang masuk sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan melakukan pendekatan yang terpadu dan komprehensif untuk seluruh aspek dan sektor dengan melibatkan semua *stakeholder* baik di tingkat pusat (K/L), tingkat daerah maupun lintas pelaku di tingkat masyarakat, dan swasta.
2. ITMP digunakan sebagai *platform* bersama dalam penyusunan sebuah perencanaan, pelaksanaan program dan pengendaliannya yang berisi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemangku kepentingan.

3. Sebelumnya sudah ada beberapa dokumen terkait perencanaan untuk pengembangan pariwisata Lombok, namun antar dokumen satu dengan yang lainnya harus saling sinkron dan bersinergi guna menghasilkan perencanaan yang terpadu.
4. Dalam mendukung pengembangan KSPN Lombok perlu dukungan tidak hanya dari pemerintah pusat saja, namun perlu juga dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah Kota/Kabupaten serta *stakeholder* terkait pariwisata di Lombok
5. Lombok *Tourism Masterplan* akan berhasil apabila terjamin 2 hal yaitu kolaborasi dan transparansi. Perlu juga adanya jadwal atau *timetable* yang dibuat secara jelas dan lengkap dengan tahapannya (*staging*).

B. SESI PRESENTASI OLEH NARASUMBER

1. **Narasumber** : **I Dewa Gde Sugihamretha**
Instansi : **Jabatan Fungsional Perencana Utama, Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Ekonomi, Bappenas**

Materi yang disampaikan :

- a. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019 untuk itu RKP 2019 berfokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan nasional dalam RPJMN.
- b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai penutup kabinet kerja:
 - 1) 2015, melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
 - 2) 2016, Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat pondasi pembangunan yang berkualitas.
 - 3) 2017, Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.
 - 4) 2018, Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
 - 5) 2019, Pemerataan pembangunan untuk perumbuhan berkualitas.
- c. Tema RKP tahun 2019 berbunyi Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan 5 (lima) prioritas nasional yaitu:
 - 1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
 - 2) Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
 - 3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya
 - 4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air
 - 5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
- d. Dalam peningkatan integrasi sumber-sumber anggaran, sumber pendanaan tidak hanya berasal dari APBN, *private sector*, maupun BUMN, tetapi juga hibah dari *World Bank*.
- e. Poin 3 prioritas nasional terkait dengan kegiatan pariwisata dilakukan melalui kebijakan percepatan pengembangan 10 kawasan pariwisata termasuk 4 KEK pariwisata, dan penguatan destinasi unggulan, penguatan struktur ekonomi kreatif, pengembangan kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB), peningkatan perdagangan dalam dan luar negeri, dan perluasan akses keuangan/pembiayaan.
- f. Target 20 juta wisatawan pada tahun 2019 (*market share* Indonesia di internasional masih kecil) dan beberapa kondisi dan potensi yang perlu menjadi pertimbangan dalam penanganan pembangunan termasuk pengembangan pariwisata adalah kondisi *aging population* dan potensi generasi milenial.
- g. Beberapa gambaran terkait aktivitas wisatawan mancanegara di Indonesia antara lain:
 - 1) Jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia (2017) adalah sebanyak 14 juta orang.

- 2) Share wisman yang berkunjung ke Indonesia (*inbound*) terhadap total kunjungan wisatawan dunia baru mencapai +1,0 persen, Asia Pasifik +4,3 persen, dan ASEAN +11,6 persen.
 - 3) Wisman masuk ke Indonesia melalui 19 pintu utama : Ngurah Rai (40%), Soekarno-Hatta (18%), dan Batam (11%). Bandara Adi Sucipto hanya menerima kunjungan sebanyak 142 ribu wisman (1%)
 - 4) Berdasarkan kewarganegaraan, Tiongkok, Malaysia dan Singapura adalah 3 kontributor wisman terbesar di 2017; sedangkan dari luar Asia terdapat, Australia (urutan ke-4), Inggris (ke-8), dan Amerika Serikat (ke-9).
- h. Dukungan kebijakan pariwisata yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan inovasi produk pariwisata meliputi atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi agar wisatawan mancanegara tertarik untuk menggunakan produk tersebut sehingga aktivitas jual-beli di industri pariwisata meningkat.
 - i. Berdasarkan arahan presiden pada tanggal 6 November 2015 terdapat 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang (KEK), Tanjung Lesung (KEK), Kepulauan Seribu dan Kawasan Kota Tua, Borobudur dan sekitarnya, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika (KEK), Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai (KEK).
 - j. Informasi terbaru berdasarkan arahan presiden pada bulan November tahun 2017 bahwa dari 10 DPP terdapat 4 DPP paling prioritas yaitu DPP Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika, dan Labuan Bajo.
 - k. Bali merupakan salah satu contoh *integrated-funding*, namun hanya berlangsung sementara lalu tidak dilanjutkan lagi. Antisipasi permasalahan infrastruktur dan kemacetan perlu juga diperhatikan sebagai dampak dari suatu daerah pariwisata yang sedang berkembang.

2. Narasumber : George Soraya
Instansi : The World Bank
Materi yang disampaikan :

- a. *Indonesia Tourism Development Program (ITDP)* mencakup:
 - 1) Pengembangan Kelembagaan
 - 2) Infrastruktur
 - 3) Pembangunan kapasitas masyarakat (partisipatif)
 - 4) Kemudahan investasi swasta
- b. *Tourism* memiliki peranan penting di Indonesia, salah satunya adalah untuk memberantas kemiskinan dan melakukan pemberdayaan wanita.
- c. Terdapat 4 hal yang menghalangi kemajuan pariwisata di Indonesia, yaitu koordinasi yang kurang kuat antar *stakeholder* , akses infrastruktur yang kurang baik, kebersihan lokasi wisata yang tidak dijaga, dan pemeliharaan aset yang kurang terjaga.
- d. Paket pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan oleh *World Bank Project* adalah Borobudur, Danau Toba, dan Lombok.
- e. Proses pelaksanaan pengembangan pariwisata di Indonesia, khususnya di Lombok akan menggunakan dokumen ITMP Lombok sebagai *guidelines* oleh *stakeholder* pusat (Kementerian/Lembaga) dan daerah (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota)
- f. Penyusunan ITMP Lombok diharapkan dapat melingkupi kebijakan terkait pengembangan kelembagaan, perencanaan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia di sektor pariwisata, dan memberikan kemudahan sektor private untuk melakukan investasi.
- g. Diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat (K/L), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, komunitas, swasta, dan lembaga terkait (perguruan tinggi, para ahli, LSM, dll) dalam proses penyusunan dokumen ITMP Lombok.
- h. Keterlibatan para pihak terkait secara langsung di lapangan menjadi salah satu syarat untuk tersusunnya dokumen ITMP Lombok yang relevan, *up to date*, dan aplikatif dalam menciptakan rencana pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

- i. Dibutuhkan produk rencana untuk 20 tahun dan 5 tahun yang lebih detail (untuk segera diimplementasikan). Hal ini menjadi persyaratan kondisi yang harus dipenuhi agar dapat mengoptimalkan pendanaan yang sangat besar yang telah disiapkan sebagai bentuk perhatian yang besar dari pemerintah Indonesia bagi pengembangan kepariwisataan di Lombok.
- j. Tantangan terbesar yang akan dihadapi dalam mewujudkan *Lombok Tourism Masterplan* adalah perlu adanya *national policy* yang sama dan berlaku untuk program pariwisata dan instansi lainnya, *planning document* yang tunggal, perlunya informasi yang sama untuk semua pihak (website tunggal untuk semua departemen), dan sistem yang legal dan fleksibel.

3. Narasumber : Henky Manurung
Instansi : Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata

Materi yang disampaikan :

- a. Sektor pariwisata sebelumnya belum pernah dikerjakan secara serius oleh pelaku usaha, dalam menggarap potensi pariwisata dilakukan dengan cara memperbaiki berbagai destinasi dan membangun *brand*.
- b. Pariwisata dianggap memiliki keunggulan mengingat mayoritas berada di sektor jasa. Selain itu, pariwisata merupakan komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga ke level paling bawah masyarakat. Setiap tahun performa pariwisata Indonesia terus menanjak.
- c. Kementerian pariwisata mendukung program *ease of entering Indonesia and ease of doing investment in Indonesia* sebagai langkah untuk mendorong pengembangan pariwisata di Indonesia.
- d. Saat ini KEK eksisting adalah Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Mandalika, Morotai dan yang sedang akan diproses menjadi KEK adalah Mentawai, Singhasari, Sungailiat, dan Tanjung Gunung.
- e. Strategi pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata adalah *branding (National Branding, Regional Branding, dan Local Branding)*, *Advertising (By Customer, By Product, dan By Event)*, serta *Selling (Travel Mart, Direct Sale, Festivals)*.
- f. Strategi industri dan kelembagaan pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata adalah SDM (Peningkatan kapasitas & sertifikat profesi), masyarakat (sadar wisata & UMKM), dan industri (sertifikasi usaha).
- g. Strategi destinasi pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata adalah dengan atraksi (budaya, buatan), aksesibilitas (infrastruktur transportasi udara, laut, dan darat), serta amenitas (prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata)
- h. Strategi peningkatan investasi pariwisata adalah deregulasi, profiling, promosi, advokasi, dan pembiayaan.
- i. Mengutip ucapan Bapak Gubernur Bank Indonesia bahwa pariwisata adalah pilihan tepat untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Karena pariwisata mampu meningkatkan cadangan devisa negara yang tergerus sejak Februari lalu. Hal ini dikarenakan terus digunakannya cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
- j. Pertumbuhan wisatawan di Indonesia memiliki nilai yang cukup tinggi yaitu sekitar 22%, dibandingkan dengan pertumbuhan turis di ASEAN sebesar 7% dan dunia sebesar 6,4%.
- k. Terhitung bulan Januari-Desember 2017, dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, Indonesia berada di posisi kedua teratas dengan pertumbuhan wisatawan sebesar 22%, Vietnam sebesar 29%, Thailand sebesar 8,7%, Singapura 5,8%, sedangkan Malaysia mengalami penurunan sebesar 4,0%.
- l. Keunggulan Wonderful Indonesia di negara-negara Asia berdasarkan World Economic Forum (WEF) 2017 diketahui bahwa *Brand Strategy Rating* Indonesia berada di peringkat 47 mengalahkan Thailand (68) dan Malaysia (85). Strategi branding Wonderful Indonesia dalam

tahap penetrasi online memiliki keunggulan dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia namun masih kalah dengan Singapura.

- m. *Brand Strategy Rating* dinilai dengan mempertimbangkan:
 - 1) Indikator dari NTO yang fokus pada *digital demand* (D2)
 - 2) *Positioning strategy* dan promosi pariwisata yang berhubungan dengan *brandtags*
 - 3) Jumlah total pencarian *online* dari wisatawan mancanegara
- n. TTCI Indonesia berdasarkan hasil *World Economic Forum* (WEF) terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2008 hingga 2017. Apabila dihubungkan dengan *competitiveness index*, Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2008 hingga 2017 dengan peringkat masing-masing 80, 81, 74, 70, 50, dan pada tahun 2017 pada peringkat 42.
- o. Kebijakan arah pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan berdasarkan:
 - 1) Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - 2) Orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - 3) Tata kelola yang baik;
 - 4) Terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - 5) Mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
- p. Upaya pengembangan industri dan kelembagaan yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata meliputi pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui sertifikasi kompetensi dan pelatihan dasar kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat melalui gerakan sadar wisata di destinasi wisata dan sekitarnya, dan pengembangan industri kreatif pariwisata melalui sertifikasi usaha pariwisata di 13 bidang usaha pariwisata.
- q. Sebagai suatu acuan, Ranking Indeks Daya Saing (berdasarkan *Travel and Tourism Competitiveness Report* dari WEF) menunjukkan peringkat yang meningkat, akan tetapi secara lebih rinci, indeks yang terkait dengan pariwisata (khususnya *environment sustainability*) masih jauh berada di peringkat bawah selama beberapa tahun terakhir. Kementerian Pariwisata akan berusaha untuk menaikkan peringkat tersebut, dengan berfokus pada beberapa subindex dari *environment sustainability*.

4. Narasumber : Gatot Subyargo Wijayadi
Instansi : Kasubdit Jasa Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Jasa Lainnya, Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Materi yang disampaikan :

- a. Dibutuhkan kesiapan rencana tata ruang baik itu RTRW maupun RDTR untuk mendukung penawaran investasi (asing dan lokal) dalam rangka mendorong industri pariwisata (tidak sekedar bisnis pariwisata).
- b. Bentuk investasi yang potensial untuk dikembangkan saat ini adalah di bidang infrastruktur dan usaha/bisnis kreatif.
- c. Permasalahan perijinan masih menjadi kendala yang harus mendapatkan perhatian untuk dilakukan efisiensi. Kemudahan perijinan menuntut pemerintah daerah diharapkan dapat memproses syarat perijinan dalam waktu cepat 10 -12 hari sehingga dapat menarik para investor untuk memulai dukungannya terhadap kegiatan pariwisata.
- d. Rencana KSPN dan Perda RTRW yang telah ada saat ini belum optimal dalam mendukung kebutuhan izin investasi. Karenanya dibutuhkan penguatan substansi dalam kedua hal tersebut.

- e. Permasalahan yang sering terjadi dalam proses perencanaan tata ruang adalah tidak bisa menerjemahkan Peraturan Presiden mengenai peruntukan ruang, diperlukan penyelarasan antar *stakeholder* agar dapat saling integrasi.
- f. NTB memiliki potensi yang strategis dalam bidang perikanan, namun daya tarik pariwisata bisa bermacam-macam jenis.

5. Narasumber : Ir. Ridwan Syah, M.Sc, MM, M.TP
Instansi : Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Barat
Materi yang disampaikan :

- a. Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai saat ini pertumbuhan ekonominya cukup baik dan diatas pertumbuhan ekonomi nasional walaupun angka kemiskinan masih relatif tinggi tetapi progresif.
- b. Pendapatan utama Pulau Lombok adalah sektor pariwisata, sedangkan Sumbawa pada pertambangan dan peternakan.
- c. Dalam konsep Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), NTB masuk dalam koridor 5 sebagai penjaga pangan nasional dan pariwisata.
- d. Lombok sedang diuji coba untuk difokuskan pada *community based tourism*. Tren *community based tourism* dikembangkan oleh komunitas itu sendiri dan efeknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota/kab harus diintegrasikan.
- e. Saat ini provinsi NTB sudah memiliki 13 *Master Plan* dari berbagai instansi namun masing-masing belum saling integrasi dan tidak ada saling keterkaitan antar satu *Master Plan* dengan yang lainnya, oleh karena itu *masterplan* harus memiliki tujuan dan prioritas yang jelas
- f. *Master Plan* yang sudah ada harus diintegrasikan dengan RPJMD, dan saat ini gubernur NTB baru sedang menyusun RPJMD sehingga apabila *Integrated Tourism Masterplan* sudah jadi bisa diintegrasikan dalam RPJMD.

C. SESI DISKUSI :

1. Bapak Irawan, ITDC:

- a. Pariwisata di Bali dapat dibilang belum sempurna karena seharusnya pengembangan yang tidak merata sedangkan faktor ekonomi dan infrastruktur dapat terdistribusi secara merata. Akibatnya seperti yang terjadi di Mandalika, terjadi urbanisasi dari tempat lain sehingga menyebabkan kepadatan penduduk, sehingga perlu dicari cara untuk menata pariwisata di Lombok agar perkembangannya terdistribusi dengan merata.
- b. *Master plan* ini bukan hanya sebagai paduan tata ruang tapi juga perlu menjadi produk hukum atau di-perda-kan. Hal ini diperlukan untuk mengunci pembangunan agar lebih teratur terutama bagi penerus pembangunan di masa selanjutnya. Misalnya ada aturan yang menata pembangunan hotel berdasarkan kelasnya (bintang 1 – bintang 5).
- c. Perlu adanya pemberdayaan sosial dan kedisiplinan tata ruang. Membangun suatu hal berbentuk fisik itu tidak sulit, namun yang sulit adalah membangun manusia yang disiplin dan peduli lingkungan. Perlu adanya metode pengolahan sampah dan melatih budaya untuk tidak membuang sampah sembarangan.

2. Ibu Ira, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR:

- a. Pengadaan program Lombok *Integrated Tourism Master Plan* ini perlu integrasi investasi pihak swasta dan secara teknis perlu ada integrasi internal dalam PU sendiri (BPIW dan Cipta Karya).
- b. Berdasarkan materi yang disampaikan, belum ada keterlibatan dari Kementerian ATR/BPN terkait dengan masalah pertanahan. Muncul kekhawatiran apabila *master plan* sudah dikerjakan namun terkendala implementasinya akibat permasalahan tanah. Oleh karena itu perlu kebijakan dan solusi untuk masalah pertanahan ini melalui keterlibatan Kementerian ATR/BPN.

3. Ibu Tina, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR:

- a. Dengan adanya ITMP ini diharapkan dapat mendorong sumber daya masyarakat tidak hanya di dalam kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tetapi juga di luar kawasan KEK, serta mempersiapkanantisipasi apabila muncul kesenjangan pengembangan antara kawasan KEK dan sekitarnya.
- b. Sistem air minum dan air bersih harus sangat diperhatikan karena banyak kawasan pariwisata yang dieksploitasi namun kekurangan air bersih untuk masyarakat lokalnya.

4. Bapak Wiranata, Kabid Fisik Bappeda Kabupaten Lombok Tengah:

- a. Di Lombok Tengah terdapat banyak area yang akan dikembangkan aksesibilitasnya, salah satunya adalah akses *by pass* dari bandara ke KEK yang dapat mempersingkat waktu tempuh menjadi 15 menit. Dalam pengerjaannya perlu ada kepastian pada masyarakat karena diperlukan pembebasan tanah. Oleh karena itu, *Master Plan* ini perlu disegerakan keberlangsungannya.
- b. Mengenai lahan hijau, perlu adanya koordinasi dengan pihak kehutanan provinsi dalam hal reservasi hutan di area Lombok Utara untuk memenuhi kebutuhan air.
- c. Pihak Kementerian ATR sudah memfasilitasi KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) dan melibatkan beberapa *stakeholder*. Hal ini diharapkan bisa terkait dan terintegrasi dengan *Integrated Tourism Master Plan* Lombok ini. Dari masing-masing Pemerintah Daerah di Lombok sudah ada 13 *Master Plan*, namun perlu ada *Master Plan* yang terintegrasi secara menyeluruh.
- d. Pelabuhan Perikanan Nusantara di Teluk Awang Lombok diharapkan bisa dikembangkan seperti pusat perikanan Tsukiji Market di Jepang.

5. Bapak Kuswardono, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis:

- a. Lombok *Integrated Tourism Master Plan* ini tentu diharapkan bisa menjadi Peraturan Presiden karena potensi dan efeknya lintas provinsi dan nasional. Akan lebih baik lagi apabila dari Bank Dunia bisa membantu merumuskan pembelajaran dari proyek-proyek *tourism* sebelumnya seperti Bali.
- b. Lombok *Integrated Tourism Master Plan* ini bukan rencana induk sektor BPIW melainkan perintah dari Bapak Presiden yang berupa rencana pengembangan pariwisata dimana pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur ditujukan untuk mengembangkan pariwisata di Lombok.
- c. Pengembangan pariwisata tidak hanya untuk meningkatkan devisa negara dan tingkat kunjungan tetapi juga bagaimana caranya untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan di daerah masing-masing. Kita bisa belajar dari apa yang terjadi di Angkot Wat dimana aset pariwisata yang dieksploitasi hanya bisa dinikmati oleh investor-investor asing sedangkan masyarakat lokal tidak menerima manfaatnya bahkan mengalami kerugian, oleh karena itu penjagaan aset juga sangat penting.
- d. Produk *Master Plan* ini merupakan memorandum program, jadi tidak ada rencana pembangunan yang akan didanai apabila tidak ada di *Master Plan*. Dana lain diharapkan agar sinergi ke arah yang sama. Hal ini juga akan menggandeng potensi swasta di pariwisata ini.
- e. Bandar Kayangan seluas 7300 Hektar deliniasinya belum pasti, oleh karena itu kita tidak akan mengerjakan daerah tersebut.

6. Bapak I Dewa Gde Sugihamretha, Perencana Utama Bappenas

- a. Pembentukan budaya atau transformasi sosial adalah tugas bagi kita semua, BAPPENAS akan berkoordinasi dengan bidang-bidang lainnya.
- b. Gili Trawangan apabila tidak dikelola dengan baik belum tentu masih ada dalam 10-15 tahun lagi. Dari studi BAPPENAS di Pulau Nikoi, Kepulauan Riau, ada sebuah *private island* yang *sustainable* dan bisa dijadikan pembelajaran.

7. Bapak George Soraya, The World Bank

- a. Membangun merupakan hal yang penting, namun masalah yang lebih penting di Indonesia adalah pemeliharaan aset. Indonesia dianggap buruk dalam pemeliharaan aset, oleh karena itu tantangan terbesar pada konsultan adalah menemukan kesepakatan dalam menentukan dan

preservasi aset terlebih dahulu bukan membangunnya. Perlu dipikirkan bagaimana cara membangun tanpa mengurangi atau merusak aset.

- b. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membangun *Master Plan* ini, apabila masyarakat mendapatkan dan merasakan manfaat dari *Master Plan* ini maka mereka pun akan turut serta menjaga aset pariwisata tersebut.
- c. Hal yang membedakan *Master Plan* ini dengan *Master Plan* yang lainnya adalah dananya sudah disediakan APBN, jadi Lombok *Tourism* ini bukan sesuatu yang diperjuangkan lagi. Dana ini tidak bisa dipakai apabila usulannya tidak ada di dalam *Master Plan* yang akan dibuat oleh konsultan, oleh karena itu *Master Plan* ini sangat penting dan strategis.
- d. Perbedaan *Master Plan* ini dengan yg lain :
 1. *Master plan* ini memiliki *steering comitee* antar departemen, BPIW ini hanya salah satu *stakeholder*.
 2. Alokasi dananya sudah disiapkan dan ditentukan untuk 5 tahun ke depan. *Demand analysis* ini yg akan jadi objek penyaluran dana.
 3. Pada September ini akan sudah ada kesepakatan terkait indikasi program apa yang akan dilakukan di tahun 2019. Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Daerah tingkat 1 dan 2 sudah menyiapkan strategi, sehingga indikasi program sudah bisa dimulai meskipun *master plan* belum selesai. Investasi juga sudah bisa di mulai pada bulan September. Hal tersebut sangat bergantung pada kerjasama dari semua pihak untuk menyukseskan *master plan* ini.

8. Bapak Hengky, Asdep Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata

- a. RTRW dan *Master Plan* yang baru seharusnya sudah mulai dintegrasikan sejak sekarang, sehingga tidak ada benturan antara keduanya di akhir.

9. Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB

- a. Di provinsi sudah dilakukan PK namun tidak banyak terjadi perubahan, untuk pengembangan wilayah dengan kondisi saat ini di Lombok ada 4 pengembangan unggulan. Pengembangan yang pertama adalah di utara dengan luas lahan kurang lebih 7.300 hektar dengan konsep industri. Pengembangan yang kedua adalah Rinjani, pengembangan yang ketiga adalah Mataram Raya dengan sektor unggulan pariwisata dan jasa. Pengembangan yang terakhir adalah Mandalika. Keempat sektor tersebut semua dikembangkan untuk menunjang sektor pariwisata.
- b. Di sekitar Lombok ini terdapat banyak pulau-pulau kecil dan Pulau Sumbawa yang diarahkan sebagai tempat pemanfaatan dominan pariwisata. Perlu ada cara untuk mengintegrasikan pulau-pulau besar dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

10. Bapak Hidayat, Dinas Perhubungan Provinsi NTB

- a. Jalan lebar dan bagus yang dimiliki Lombok saat ini semakin meningkatkan penggunaan transportasi pribadi. Akan lebih baik apabila di *Master Plan* ini diintegrasikan dengan transportasi publik.
- b. Akses untuk masuk ke Pulau Lombok sudah bagus, tapi belum ada angkutan reguler atau *feeder* dari pelabuhan, halte maupun bandara. Konsep transportasi reguler/*feeder* ini perlu diperhatikan karena menyangkut tidak hanya masalah teknis tapi juga masalah sosial. DAMRI saat ini masih belum bisa memfasilitasi kebutuhan moda masyarakat.

11. Bapak Arif, Kabid Fisik Bappeda Kabupaten Lombok Barat

- a. Sebelum dilakukan pembangunan, harus ditetapkan terlebih dahulu ke arah mana pariwisata ini direncanakan karena terkait daya tampung dan daya fiskal daerah. Dari pengalaman di daerah Senggigi, banyak masalah yang muncul seperti kurangnya air bersih dan pencemaran lingkungan. Perlu kajian dan arah yang benar untuk tipe *tourism* yang sesuai untuk Lombok. Selain itu, perlu ada cara bagaimana mengintegrasikan desa wisata, yang mana untuk investor dan untuk pengembangan wisata serta sebisa mungkin menghindari *mass tourism*.

12. Bapak Juris, Badan Pertanahan Nasional

- a. Banyak pemilik tanah asli yang tersingkirkan oleh investor lokal seperti yang terjadi di Danau Toba. Mohon dijadikan pertimbangan dalam pembuatan sistem pertanahan.

13. Bapak Sacha Schwarzkopf, AECOM

- a. Ini merupakan kesempatan yang sangat tidak biasa, sangat penting sebagai dasar bagi proses ini. Seluruh *stakeholder* yang akan terlibat yaitu sektor privat dan publik, masyarakat, pemerintah daerah dan yang lainnya.
- b. Ini adalah tentang membangun konsensus dan kita harus menyusun prioritas. Mengenai transformasi sosial, perlu diketahui bagaimana memulainya dan jenis transformasi sosial yang seperti apa. Komponen dalam *Master Plan* perlu kekuatan, namun tetap fleksibel.
- c. Untuk Bali, saya pikir pada suatu titik tertentu Bali tidak memiliki pilihan program apa yang akan mereka gunakan. Seharusnya, kita tidak hanya membangun, tapi juga mengembangkan dan membuat tahapan. Untuk mengembangkan, kita perlu menentukan apa saja prioritasnya. Awali dengan menentukan prioritas yang akan memandu transformasi sosial
- d. Dalam beberapa minggu kedepan akan mengadakan pengumpulan data, dan setelah acara *Kick-Off* akan menghubungi dinas-dinas terkait untuk data yang dibutuhkan sebagai analisa awal untuk *visioning workshop*.

14. Bapak Ridwan, Kepala BAPPEDA NTB

- a. Karena di Kick Off Meeting sudah banyak SKPD yang hadir, mungkin akan lebih efisien jika pengumpulan data dijadikan satu pintu di BAPPEDA, akan difasilitasi pertemuan oleh BAPPEDA NTB untuk mengundang seluruh SKPD Daerah yang diperlukan datanya.
- b. Dalam prinsipnya, *Master Plan* ini harus jelas posisinya dimana dalam konteks perencanaan daerah sehingga daerah harus ikut andil dalam penyusunan *Master Plan*.
- c. Studi akses *port to port* sedang dilakukan yaitu rencana pembangunan jalan dari *port* ke Mandalika hingga *Pink Beach*. *Master Plan* diharapkan dapat menggabungkan prioritas nasional dan prioritas daerah. *Master Plan* yang disusun bersama ini, jangan dibuat terlalu optimis tapi daerah tidak mampu mengabaikan pembebasan lahan juga terkait dengan kuota fiskal daerah. Selain itu, keterkaitan *Master Plan* dengan RPJMD harus jelas.
- d. Pengembangan Bandar Kayangan ini masih dalam konsep dan dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan sebagai salah satu kawasan andalan nasional. Bandar Kayangan akan menjadi kota industri baru di Lombok dan saat ini sedang dalam tahap pembebasan lahan bertahap 6.000 hektar.
- e. Seharusnya *Master Plan* ini merajut kepentingan pusat, mimpi daerah tapi punya pijakan hukum yang kuat.

15. Bapak Tony, Direktorat Transportasi BAPPENAS

- a. Dalam menyusun *Master Plan* seharusnya tetap mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur transportasinya dan bagaimana *demand* kedepan. Misalnya pada akses bandara ke Mandalika, beberapa tahun kedepan harus menjadi seperti apa *public transport*-nya, dan jalan aksesnya.
- b. Bandar Kayangan juga dimasukkan dalam *Master Plan*, terutama dampak yang akan dibutuhkan (air bersih)

16. Bapak Anugrah, BWS Nusa Tenggara 1

- a. Pengembangan wisata yang akan dilaksanakan di Lombok sebagian besar merupakan wisata yang berbasis alam, tentunya jika berbasis alam perlu diperhatikan dampak-dampak lingkungan yang akan terjadi di sekitar kawasan wisata tersebut. Sudah seharusnya dalam *Master Plan* memasukan unsur dampak lingkungan (gerusan pantai, longsor, sampah) agar bisa tetap terjaga keseimbangan alamnya.
- b. Secara keseluruhan Pulau Lombok seharusnya memiliki suatu *baseline* yang dijadikan acuan untuk pembangunan dan acuan dalam membuat *Masterplan*. Karena sebagian besar kawasan wisata lombok adalah pantai, mungkin menjaga *environment* pantai bisa menjadi salah satu *baseline*.

17. Bapak Novi, AECOM

- a. Dalam *Master Plan* yang sedang disusun AECOM sudah sampai 6 kali berganti *design*, persoalan dari *sand filling* menimbulkan perubahan pada arus air di sekitarnya (abrasi). Konsep yang akan diterapkan adalah konsep daya dukung. Namun konsep daya dukung ini perlu

dsetujui juga oleh seluruh *stakeholder*, apabila dsetujui akan membuat visi dari *baseline* tersebut dan akan terlihat *gap* ada dimana.

- b. Dalam mengambil isu yang akan dijadikan sebuah *baseline* perlu melihat dari keseluruhan satu Pulau Lombok, tidak hanya mengambil dari satu *project* atau lokasi, misalnya hanya mengambil sampel Mandalika, Senggigi, Rinjani, atau Desa Sade.

D. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Ir. Kuswardono, MCP

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, BPIW

1. Dalam penyusunan ITMP *Lombok*, perlu berorientasi pada daya dukung lingkungan dan *co-benefit* (pengembangan ekonomi secara bersamaan dengan perlindungan dan penanganan lingkungan). Karenanya dibutuhkan suatu pembelajaran dari beberapa keberhasilan dan kegagalan pengembangan kepariwisataan yang telah dikembangkan di tingkat nasional yang berskala internasional seperti Bali.
2. Pengembangan kepariwisataan di Lombok diharuskan untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (*human resource development*) sebelum pembangunan fisik
3. Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan ITMP *Lombok*, maka perlu disiapkan *milestones* (substansi dan *time frame*) yang menjadi acuan bersama dalam mewujudkan dokumen perencanaan yang *reliable*, layak dan dapat diimplementasikan.
4. Konsekuensi dari akan dilaksanakannya ITMP adalah dibutuhkannya pendekatan penanganan secara Kolaboratif antar pemangku kepentingan di lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk kelembagaan penanganan berupa Kelompok Kerja (Pokja). Dimana dalam pokja tersebut berisi perwakilan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kota/Kabupaten.